

Jl. 22-08-072

Daya-saing dan Produktivitas Nasional^{*)}

Sri-Edi Swasono

Masalah produktivitas faktor-faktor produksi (*land, labor, capital, skill* dan *x*) adalah masalah daya-saing nasional. Masing-masing faktor produksi memiliki produktivitas tertentu dalam kombinasinya dengan faktor-faktor produksi yang lain (*pattern of factors of production mix*). Faktor produksi *x* (*entrepreneurship*) yang menentukan *die neue kombinationen* (*the new combination*) antar faktor-faktor produksi menjadi faktor produksi eksternal yang menentukan relativitas tinggi rendahnya produktivitas masing-masing faktor produksi dalam kombinasinya dengan faktor-faktor produksi lain.

Dengan demikian produktivitas ekonomi sebagai daya-saing, baik secara mikro maupun makro, tergantung pada optimalitas dari *die neue kombinationen*, yang merupakan suatu *science and art* dalam pengelolaan keekonomian.

Mutu dan kadar produktivitas masing-masing faktor produksi tentu dapat ditingkatkan; yang berkaitan dengan SDM

^{*)} Disampaikan di Lemhannas dalam rangka Pembentukan Panitia Seminar "Refleksi Satu Abad Kebangkitan Nasional (1908-2008) dan Satu Dasawarsa Refor-

(labor, skill) melalui upaya-upaya *upgrading*, sedangkan yang berkaitan dengan SDA melalui upaya-upaya *mixing* dan *remixing* dengan *auxiliary inputs* (sarana, prasarana, *software* ataupun *hardware*).

Dengan demikian pula daya-saing ekonomi, baik mikro atau makro merupakan suatu prestasi (*achievement*) dalam suatu keekonomian, suatu *science and art* yang dapat dipelajari, dirancang dan diterapkan.

Kaitan antara produktivitas mikro dengan produktivitas makro (nasional) sangat erat, sehingga harus dibahas secara simultan. Peran produktivitas mikro tidak akan bermakna (akan kocar-kacir) tanpa dikaitkan dengan tujuan makro nasional dalam menghadapi tuntutan global.

Sumber Daya Manusia vs Sumber Daya Alam

Sumber daya manusia (SDM) di dalam fungsi produksi (*production*

function) dapat berupa mutu/kadar produktivitas *labor* (tenaga kerja) dan *skill* (keahlian).

Di Indonesia tenaga kerja Indonesia telah memperoleh cap "berproduktivitas rendah", minimal (*ceteris paribus*) dari 3 segi: (1) Berpendidikan rendah. Dari 93,7 juta penduduk yang bekerja (2004) tingkat pendidikan SD/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, mencapai 56,3% (tidak pernah sekolah 5,6%, tidak tamat SD 13,3%, tamat SD 37,4%). Sedangkan berpendidikan SMTP 18,3%; SMTP vokasional 1,3%; SMTA 12%; SMTA vokasional 6,2%; diploma & akademi 2,2%; dan universitas hanya 3%. (2) Seperti tertera pada butir di atas, mereka yang berpendidikan di atas SD kebanyakan berpendidikan umum, bukan berpendidikan vokasional, yang berakibat *ombyokan* tidak tersaring (*primarily tested*), berketrampilan rendah (tidak *skillful, erroneous*). (3) Angkatan kerja Indonesia (2004) yang mencapai angka sebesar 104 juta meng-

masi (1998-2008) untuk Meningkatkan Daya-Saing Indonesia di Era Global dalam Rangka Menjunjung Tinggi Harkat dan Martabat Bangsa", Jakarta, 12 Ma-

ret 2008. Apa yang ditulis di sini adalah pendapat pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pendapat formal LEMHANNAS.

hadapi hambatan sosial-budaya dan berbagai *unfreedom* luar biasa untuk mengangkat diri menjadi mampu produktif. Pengangguran terbuka (2004) mencapai lebih dari 10 juta orang, berarti mencapai angka 10%.

Pengutamaan pembangunan SDM mendapat tempat sangat strategis, disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai "...mencerdaskan kehidupan bangsa", yang setingkat makna pentingnya dengan tujuan nasional lainnya yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".

Peningkatan mutu SDM Indonesia di masa lalu senantiasa dikaitkan dengan tujuan pendayagunaan sumber-sumber alam (SDA). Pemberdayaan (*empowerment*) SDM didahulukan dari pendayagunaan SDA: jangan menggali dan mengolah SDA sebelum SDM kita mampu (Sockarno, 1960).

Di lingkungan ISEI orientasi pembangunan adalah beramai-ramai membangun pertumbuhan ekonomi. Mereka ini tentunya alpa bahwa pembangunan nasional adalah suatu tanggungjawab terencana untuk membangun, manusia Indonesia seutuhnya

dalam berperikehidupan yang makin bermartabat (produktif, mandiri, tidak apatis). Artinya pembangunan tidak saja untuk "mencari nilai-tambah ekonomi" tetapi juga "nilai-tambah sosial-budaya" bagi rakyat. Nilai-tambah sosial-budaya ini berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Membangun rakyat yang masih kurang berkemampuan memperoleh prioritas utama.

Kelompok ISEI pada umumnya masih enggan menerima definisi pembangunan humanistik yang mulia bahwa *development is an expansion of people's capabilities and creativity*, pembangunan adalah perluasan kemampuan dan kreativitas rakyat, sangat produktivitas sentris, sebagaimana ditegaskan oleh *Nobel Laureate* Amartya Sen (Sen, 1999). Pembangunan adalah perihal meningkatkan *human capital* (Hatta, 1967), yang kemudian secara keseluruhan membentuk *social capital* bangsa, bahwa pembangunan haruslah beralih dari *human investment* agar bisa dengan lebih baik mengelola modal *natural resources* dan modal *financial* sebagai tuntutan riil dan empirik. Utang luar negeri diutamakan sebagai *human investment* demi membentuk *human capital* berkualitas.

Kelompok ISEI pada umumnya lupa bahwa tugas nasional kita adalah "...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa...". Si manusiayalah (rakyat dan bangsa) yang merupakan *subject matter* pembangunan. Oleh karena itulah maka konstitusi kita menegaskan "...Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan (*anti pengangguran*) dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*anti kemiskinan*)..."; juga sangat produktivitas sentris. Pertumbuhan ekonomi adalah derivat dari cita-cita konstitusional ini.

Produktivitas dan Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial-budaya utama yang menghambat produktivitas adalah *cultural-unfreedom*, yang berbeda dengan *social-unfreedom* seperti kemiskinan (yang menghambat kesempatan memperoleh pendidikan) dan kebodohan (yang menghambat *curiosity* dan *drive to progress*), dst.

Cultural-unfreedom dapat berupa hambatan untuk dapat terjadinya

mobilitas sosial (vertikal ataupun horizontal) dalam arti produktif-positif dan juga dapat berupa suatu eksklusivisme paternalistik/feodalistik yang menghalangi partisipasi dan emansipasi dalam berperikehidupan sosial, ekonomi, politik, birokrasi, dst.

Cultural-unfreedom lainnya berkaitan dengan pandangan budaya (terkadang juga riligi) terhadap partisipasi dan emansipasi produktif kaum perempuan hampir di keseluruhan bidang kehidupan. Budaya *male-dominant* menghambat kemampuan dan kegiatan produktif perempuan. Pengaruh hambatan ini sangat besar terhadap prestasi ekonomi nasional karena di Indonesia separo penduduk adalah perempuan. Dalam sektor pendidikan *drop-out* perempuan dan buta huruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Padahal, PBB sudah melemparkan slogan menakjubkan: *if you educate one man, you educate one person, but if you educate one women, you educate one generation.*

Barangkali kita perlu pula bicara tentang etos-kerja produktif bangsa kita. Perlu kita simak hal berikut ini: Kita mendefinisikan bekerja penuh adalah bekerja sekitar 40 jam per minggu

(bekerja kurang dari 35 jam per minggu dinyatakan setengah menganggur dan ini (2004) mencapai angka 35% kaum pekerja. Hanya 16,44% bekerja boleh dibilang rajin, artinya bekerja lebih dari 54 jam per minggu. Hanya 22% bekerja 35-54 jam per minggu dan hanya 25% bekerja 35-44 jam per minggu). Kaum pekerja Jepang, Korea dan Cina telah bekerja sekitar 60 jam per minggu (berlembur, mengurangi libur, atau pulang membawa pekerjaan). Barangkali di samping bekerja 60 jam per hari, bagi mereka j angka waktu 1 hari adalah "28 jam" (dengan meningkatkan intensitas kerja). Sedangkan 1 hari bagi pekerja kita dinilai sangat mungkin kurang dari 24 jam per hari (dengan intensitas kerja yang rendah atau "malas"). Untuk ini berarti bahwa *the myth of lazy people* terhadap kita barangkali benar-benar memperoleh tempatnya.

Mengapa pula di negeri yang kaya raya, di tanah yang subur dan laut yang luas rakyat miskin bertambah banyak dan pengangguran meluas? Bahkan di sektor pertanian kita (2004) 56,48% pekerja bernasib setengah menganggur. Kemiskinan dan pengangguran menghambat peningkatan produktivitas nasional. Stiglitz

di Jakarta (2007) bahkan mengartakan perlunya Indonesia memberantas pengangguran, membuka lapangan kerja secepatnya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya kita mengekspor TKI/TKW "mentah" sebagai "slaves". Negara-negara lain di Asia dan Afrika banyak yang juga miskin, tetapi mereka melindungi wanita-wanita mereka, mereka tidak mengekspor TKW sebagai pekerja rendahan. Apakah kita telah termakan oleh skenario kultural dari luar, ibarat *mind-set* kita tersihir diformat secara cang-gih, sehingga kita benar-benar merasa sebagai bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain", sebagai "*eine Nation von Kuli, und Kuli unter den Nationen*" sebagaimana dilontarkan oleh Emile Helfferich? Belum tentu! Rakyat kita menjadi "kuli" karena tidak pernah memperoleh pemberdayaan dan pencerdasan kehidupan secara cukup, baik dari Negara maupun dari masyarakat sendiri. TKI- TKW kita berduyun-duyun tanpa henti meninggalkan kampung halaman, melintas-batas negara demi mengejar pekerjaan, baik sebagai pendatang halal ataupun pendatang haram di negeri jiran, untuk meraih atau mengekspresikan produktivitas

kerja mereka, karena di sana ada lapangan kerja tersedia, tanpa diolah lebih dahulu oleh Negara menjadi pekerja berkualitas. Namun TKI-TKW kita cukup memiliki kesadaran bahwa hidup adalah perjuangan memperoleh kemajuan, membedah *unfreedom* dengan memangku pekerjaan sebagai cita-cita mulia, menjadi kuli merupakan suatu tuntutan hidup, yang sekaligus merupakan suatu keterpaksaan yang menyedihkan.

***Affluent society*: Pemborosan Tidak Produktif**

Affluent society yaitu masyarakat kaya yang boros berlebihan, yang 50 tahun lalu dicemaskan oleh John Kenneth Galbraith bagi rakyat Amerika Serikat, sepatutnyalah lebih perlu kita cemaskan hal ini terjadi di negeri kita yang masih di tingkat miskin-ekonomi.

Maraknya iklan-iklan komersial khususnya di televisi secara luarbiasa sebenarnya merupakan beban masyarakat. Dengan demikian pendapat Dobb, Sweezy dan Baran empat dekade yang lalu makin relevan terhadap Indonesia saat ini, yang mengingatkan bahwa iklan berlebihan ini

adalah beban sosial (*"waste of social resources"*) yang sangat mahal bagi rakyat. Namun mengapa dengan mudah menghiasi dan mendominasi siaran-siaran televisi kita. Biaya iklan adalah biaya peningkatan konsumsi boros yang tidak ada kaitannya (bahkan meng-*off-set*) produktivitas dan peningkatan produktivitas.

Affluancy terjadi tidak terlepas dari konsepsi ekonomi neoklasikal Barat, di mana tabungan (*saving*) didefinisikan sebagai sisa pendapatan (*income*) yang tidak dikonsumsi. Bagi negara miskin seperti Indonesia, khususnya dari segi paham hidup bersahaja, harus diadopsi konsepsi yang sebaliknya, yaitu konsumsi (*consumption*) adalah sisa pendapatan (*income*) yang tidak ditabung. Menabung adalah ketentuan utamanya, sebagai sumber kegiatan produktif.

Media Massa: Iklan Konsumtif, Mengabaikan Budaya Produktif

Kepada media massa, khususnya televisi yang banyak memiliki pemirsa dan efektif mempengaruhi pembentukan watak dan akhlak bangsa, diharapkan dapat mengambil peran sosial-kultural, sosial-ekonomi, sosi-

al-politiknya, bahkan peran historisnya dalam proses transformasi ekonomi, transformasi sosial dan transformasi budaya bangsa ini. Transformasi-transformasi ini tidak mudah berjalan lancar bila pola produksi nasional tidak sesuai dengan pola konsumsi nasional. Masyarakat kaya menjadi pasaran luas produk luar negeri. Daya-beli orang kaya ternyata tidak mengangkat kegiatan produksi masyarakat miskin, dan tidak ada yang ingin mengubah arah keliru ini. Bahkan daya-beli rakyat dalam negeri yang rendah makin tersedot tatkala produksi masyarakat miskin tergusur dari pasaran, kalah bersaing. Produktivitas rakyat makin anjlok. Ekonomi nasional kita tidak akan mampu mendukung arus *affluency* ini: *the economy just can't support.*

Siaran-siaran televisi kita sangat pe-
lit dengan acara yang mendorong produktivitas, kreativitas dan inovasi. Hampir tak ada di televisi kita yang mendidik dan memberi penerangan tentang bagaimana mengolah bumi, air dan kekayaan alam yang tepat dan baik dalam paket-paket serial, bagaimana mengajari masyarakat pemirsa untuk mampu memelihara, tidak mencemari dan tidak merusak tanah air kita.

Sebenarnya kepada televisi kita ditaruh harapan oleh bangsa ini untuk berperan sebagai *agent of modernization, agent of expansion of people's capability and creativity*, bukan *infotainment* yang tidak produktif dari segi manapun. Dengan kata lain, di samping sebagai hiburan dan sumber pemberitaan umum, kepada televisi diharap berperan sebagai *agent of enlightenment and empowerment* bagi bangsa ini ke arah terbentuknya budaya *entrepreneurial*, yaitu bekerja keras, beretos-kerja produktif untuk mengawali suatu transformasi budaya ke arah keadaban dan kemajuan.

Acara-acara dan iklan-iklan televisi memacu kecenderungan konsumtif ini, target-target Man menjadi absurd: "belilah" dan "makanlah". Man tidak lagi memperhatikan apakah itu menguntungkan ekonomi nasional atau tidak, apakah yang diiklankan memiliki kandungan lokal (*domestic contents*) atau tidak, apakah itu demi kemajuan pasar dalam-negeri atau demi kemajuan ekonomi dan produktivitas rakyat? Akibatnya anak-anak kita lebih tahu makan tanpa tahu memproduksi.

Kita pun mengalami deindustrialisasi,

namun kita tidak lagi resah. Toko-toko baru dibangun, *supermarkets* dan *malls* bertebaran bermunculan di mana-mana dan kasat mata, mengusuri dan "menganggurkan" rakyat dan memangkas kegiatan produktif mereka. Sementara itu kita tidak melihat ada pabrik-pabrik baru dibangun bahkan yang ada sebagian mulai tutup. Konsumsi marak sementara proses produksi menyusut. Berarti pasar kita dengan took-toko pendukungnya telah berubah menjadi benteng produksi barang-barang impor. Selain itu iklan-iklan televisi yang penuh kemewahan akan meningkatkan iritasi dan akumulasi frustrasi bagi pemirsa miskin, yang tidak memiliki daya beli dan keterjangkauan (*afford-abilzty*) cukup.

Globalisasi: Proses *Disempowerment*

Globalisasi tidak nampak memicu kerja keras. Ini merupakan wujud suatu pembiaran oleh Negara. Inikah awal dari bangkitnya sindroma "*sui-cidal society*" dalam berperikehidupan ekonomi?

Globalisasi merupakan peluang, namun sekaligus juga merupakan ma-

lapetaka bagi negara-negara miskin yang rendah kapasitas dan produktivitas nasionalnya.

"...Dalam globalisasi sebenarnya banyak hal keadaan-nya telah menjadi lebih buruk... banyak kesempatan kerja menjadi hilang dan kehidupannya telah menjadi semakin tidak pasti. Pembangunan akan terus menciptakan kemiskinan dan ketidakstabilan...terkikisnya kebudayaan. ... Tanpa adanya reformasi maka dampak balik yang telah ditimbulkannya akan terus memuncak serta ketidak-puasan atas adanya globalisasi akan terus meningkat... ". Cara bagaimana globalisasi telah diatur...perlu secara radikal dipikir ulang... " (Joseph Stiglitz, 2002).

Globalisasi mendorong aktivitas ekonomi mengutamakan pencarian rente ekonomi dan kerakusan ekonomi. Kekaguman para ekonom terhadap globalisasi mengakibatkan mereka tidak mampu membedakan antara "pembangunan Indonesia" dengan "pembangunan di Indonesia". Mereka banyak yang tenggelam ke dalam absurditas ideologi ekonomi, tidak mampu membedakan apakah mereka sekedar menjadi "Host" atau harus

LAMPIRAN

Nasionalisme Indonesia:

PENYELAMATAN REPUBLIK INDONESIA

Menegakkan Platform Nasional

Platform Nasional - I

Manifesto Politik: Mempertahankan Indonesia Merdeka, Berdaulat dan Bersatu (menjunjung tinggi national *sovereignty* dan *territorial integrity*).

Manifesto Budaya: Menegakkan Bhinneka Tunggal Ika.

Ideologi Pancasila: Pancasila bagi Indonesia yang pluralistik dan multikultural adalah "asas bersama" atau *common denominator* untuk mempersatukan kebhinnekaan (pluralisme) dalam satu keutuhan tunggal.

Platform Nasional - II

Kemerdekaan berarti: *berdaulat* dalam politik, *berdikari* dalam ekonomi, *berkepribadian* dalam budaya.

Platform Nasional - III

Kepentingan nasional adalah uta-

ma, tanpa mengabaikan tanggung jawab global (kita tetap menganut politik luar negeri "bebas aktif".

Platform Nasional - IV

Yang kita bangun adalah *rakyat, bangsa dan negara*. Pembangunan ekonomi adalah derivat untuk mendukung pembangunan *rakyat, bangsa dan negara*. (Daulat Rakyat tidak boleh digusur oleh Daulat Pasar - Daulat Rakyat tidak boleh digusur oleh Daulat Partai).

Platform Nasional - V

Kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang meskipun hak-hak warga-negara orang-seorang tidak diabaikan secara semena-mena. Hubungan ekonomi nasional berdasar "kebersamaan" (*mutualism*) dan "asas kekeluargaan" (*brotherhood* atau *ukhuwah*) yang partisipatif dan emansipatif (Negara ini didirikan

berdasar "asas kebersamaan" atau Konsensus Nasional, bukan berdasar "asas peorangan" atau Kontrak Sosial). Keadilan yang *genuine* hanya bisa terwujud di dalam suasana kebersamaan yang berbasas kekeluargaan.

Platform Nasional - VI

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan rakyat, digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, dari generasi ke generasi. (Ada preservasi dan restorasi strategis terhadap kekayaan alam nasional).

Platform Nasional - VII

Proaktif ikut mendisain ujud globalisasi, berposisi sebagai subyek, bukan obyek yang antisipatif.

Platform Nasional - VIII

Dalam pelaksanaan Otonomi Da-

erah dalam NKRI dihindarkan eksklusivisme ataupun isolasionisme kedaerahan. Pemerintah Pusat harus tetap kuat. Apa yang kita tolak bukanlah Pemerintah Pusat tetapi Sentralisme Pusat-nya. (Hubungan antara Pusat-Daerah bukan "trade-off" atau "zero-sum").

Platform Nasional - IX

Apa yang kita tuju adalah "Pembangunan Indonesia bukan sekedar "Pembangunan di Indonesia". Dalam setiap kemajuan rakyat harus senantiasa terbawa-serta maju. (Pembangunan mengusir kemiskinan bukan mengusir orang miskin).

Platform Nasional - X

Hutang luar negeri bersifat *pelengkap* dan *sementara*. Investasi asing berdasar pada asas *mutual benefit* (investasi asing tidak dalam posisi dominan).